

Pengaruh Penyaluran Zakat, PDRB dan Pendidikan terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Yogyakarta Tahun 2016-2022

Merina Nurlaili Mubarakah^{1*)}, Laila Masruro Pimada²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

*E-mail korespondensi: merinanurlaili@student.ub.ac.id

Abstract

Poverty is a condition in which a person or group of people is unable to fulfill their basic needs. According to the Central Bureau of Statistics (BPS), in March 2023, the number of poor people in Indonesia amounted to around 25.90 million people, the majority of Indonesia's poor people are on the island of Java. Of the six provinces in Java, Yogyakarta province has the highest percentage of poor people, which is 11.04%. This study aims to analyze how and how much influence the distribution of zakat, GRDP and education level on poverty alleviation in Yogyakarta Province in 2016-2022. Data analysis using panel data regression in 4 regencies and 1 city in Yogyakarta Province for the period 2016-2022. The results showed that the distribution of zakat had no effect on poverty alleviation, GRDP had a negative and significant effect on poverty alleviation, and the level of education had a negative and significant effect on poverty alleviation.

Keywords: Poverty; Zakat Fund Distribution; GRDP; Education

Saran sitasi: Mubarakah, M. N., & Pimada, L. M. (2024). Pengaruh Penyaluran Zakat, PDRB dan Pendidikan terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Yogyakarta Tahun 2016-2022. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2580-2590. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14577>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14577>

1. PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum di Indonesia selalu dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Karena kesejahteraan umum dan kemiskinan memiliki hubungan negatif yaitu apabila tingkat kesejahteraan penduduk semakin tinggi maka tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia semakin rendah, begitupun sebaliknya (Bintang & Woyanti, 2018).

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial yang sedang dihadapi di setiap negara berkembang dari dulu hingga sekarang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2023, jumlah penduduk di Indonesia yang tergolong penduduk miskin berjumlah sekitar 25,90 juta orang, dengan persentase sekitar 9,36%. Angka ini turun dari 26,16 juta orang pada Maret 2022, dengan persentase penduduk miskin sekitar 9,54%. Dalam tatanan nasional, mayoritas penduduk miskin Indonesia berada di Pulau Jawa dengan jumlah mencapai 13,62

juta orang (BPS, 2023). Hal ini disebabkan karena Pulau Jawa merupakan pusat dari pembangunan ekonomi di Indonesia, sehingga 3 (tiga) dari 6 (enam) provinsi di Pulau Jawa termasuk dalam kategori provinsi dengan presentase penduduk miskin diatas angka kemiskinan nasional. Provinsi tersebut adalah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Yogyakarta. Dari ketiga provinsi tersebut, persentase penduduk miskin tertinggi berada di Provinsi Yogyakarta dengan presentase sekitar 11,04% (BPS, 2023). Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk Provinsi Yogyakarta di setiap tahunnya meningkat dan terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga tidak seimbang antara sumber daya manusia dan lapangan pekerjaan yang ada.

Persoalan kemiskinan di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang sangat kompleks. Menurut Sharp, et.al (1996) penyebab utama kemiskinan, diantaranya: pertama, ketimpangan distribusi pendapatan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan pola kepemilikan sumber daya. Kedua, perbedaan akses dalam modal. Dan ketiga, perbedaan kualitas sumber

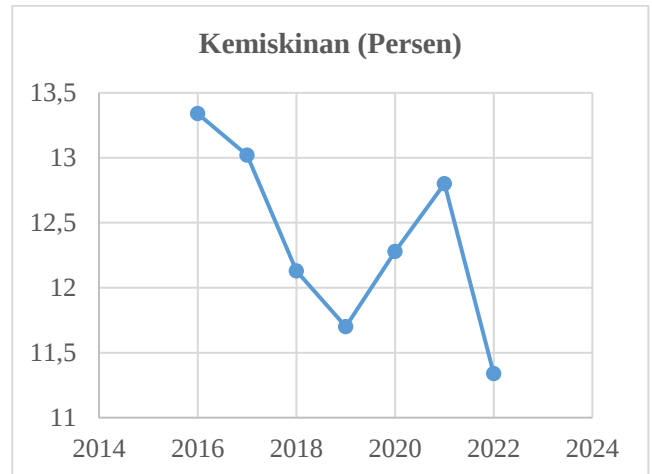
daya antar manusia. Ketiga penyebab kemiskinan tersebut bersumber pada teori yang digagas oleh Ragnar Nuscheler pada tahun 1980 yaitu teori lingkaran setan kemiskinan (Jayadi & Brata, 2016); Ariasih & Yuliarini (2021)). Teori lingkaran setan kemiskinan berputar dari pendapatan rendah, pendidikan rendah, serta produksi rendah yang mengakibatkan produktivitas menjadi rendah dan berujung pada kemiskinan. Berlanjut pada pendapatan rendah, lalu kembali ke tingkat tabungan rendah, dan seterusnya berulang secara melingkar.

Adapun upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan pembangunan ekonomi yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009. Terdapat salah satu program pembangunan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah yaitu memberdayakan kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Adapun strategi untuk menjalankan program tersebut yaitu dengan pemerataan distribusi pendapatan. Dalam bidang ekonomi, zakat merupakan salah satu cara untuk pemeratakan distribusi pendapatan sehingga tidak ada penumpukan kekayaan antara orang kaya dengan orang miskin (Choiriyah (2018); Wibowo (2023)).

Selain itu, salah satu penanda suksesnya penerapan pembangunan dapat dilihat dari kinerja pertumbuhan ekonomi di dalam suatu wilayah yang biasa direpresentasikan dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tidak hanya masalah perekonomian saja, persoalan kemiskinan juga berkaitan dengan masalah sosial atau bidang lain yang sifatnya multidimensi, seperti bidang pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Becker (1993), dalam *Teory Human Capital* menerangkan bahwa pendidikan bisa meningkatkan produktivitas seseorang. Artinya, apabila tingkat pendidikan seseorang rendah, maka produktivitas seseorang juga akan menurun sehingga mengakibatkan tingkat kemiskinan meningkat. Dengan demikian, pendidikan memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia (Giovanni, 2018).

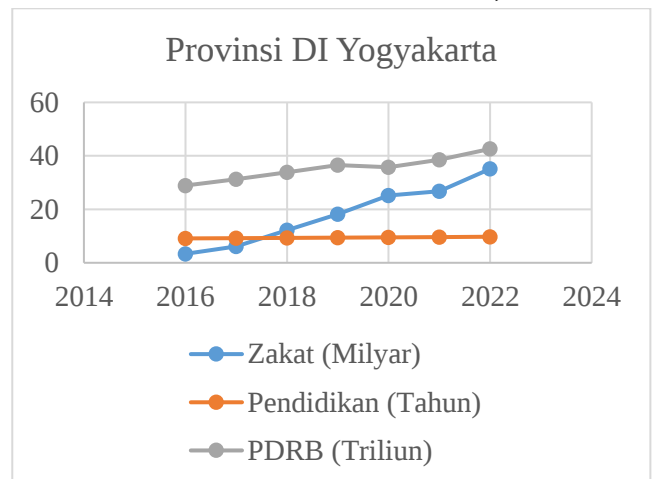
Berdasarkan teori lingkaran setan kemiskinan yang saling berkaitan, pergerakan zakat, PDRB dan pendidikan yang meningkat, seyogyanya akan menurunkan tingkat kemiskinan (Sukri, 2019; Adhitya et al., 2022; Hasibuan et al., 2022). Namun, grafik 1 dan grafik 2 menampilkan adanya

kontradiktif antara teori hasil studi empiris dan fakta di lapangan. Berikut grafik terkait data tingkat kemiskinan, penyaluran dana zakat, PDRB dan tingkat pendidikan Provinsi Yogyakarta selama kurun waktu 2016-2022:



Gambar 1. Grafik Tingkat Kemiskinan Provinsi Yogyakarta tahun 2016-2022.

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023



Gambar 2. Grafik Penyaluran Dana Zakat, PDRB dan Tingkat Pendidikan Provinsi Yogyakarta tahun 2016-2022

Sumber: Baznas DIY, 2023 (Data diolah)

Pada gambar 1, menunjukkan tren kemiskinan dari tahun 2016-2022, yang menggambarkan tingkat kemiskinan provinsi Yogyakarta berfluktuasi. Pada tahun 2016-2019 angka kemiskinan mengalami penurunan akan tetapi tahun 2020-2021 mengalami peningkatan angka kemiskinan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan kurangnya lapangan pekerjaan. Pada tahun 2022 angka kemiskinan sudah mulai turun, akan tetapi, angka kemiskinan di provinsi Yogyakarta masih tergolong tinggi dan berada diatas garis kemiskinan nasional (BPS Indonesia, 2023). Selanjutnya, pada gambar 2, jumlah penyaluran dana zakat dan tingkat pendidikan di Provinsi Yogyakarta

selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Dengan demikian, peningkatan distribusi dana zakat dan tingginya akses pendidikan harusnya mengurangi angka kemiskinan di provinsi Yogyakarta (Baznas DIY, 2023). Selain itu, persentase PDRB di Provinsi Yogyakarta mengalami kenaikan dari tahun 2016-2019 dan 2021-2022, namun pada tahun 2020 persentase PDRB mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan konsumsi rumah tangga menurun (BPS, 2023).

Pada grafik 1 dan 2, menunjukkan kontradiksi antara tingkat kemiskinan dengan penyaluran dana zakat, PDRB dan tingkat pendidikan di Yogyakarta. Adapun penelitian yang membahas terkait variabel kemiskinan di Yogyakarta telah dilakukan oleh Widya Ningsih et al. (2022); Sukri (2019); Wibowo (2023), yang menyatakan bahwa zakat, PDRB dan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Karena semakin tinggi zakat, PDRB, dan pendidikan di Indonesia, akan menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Islami & Fitrianto (2023); Muliza (2020); Giovanni (2018), yang menyatakan bahwa zakat, PDRB dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Karena penyaluran dana zakat, laju pertumbuhan ekonomi dan akses pendidikan yang belum merata dan kebanyakan orang miskin menggantungkan kebutuhan hidupnya dengan pemberian orang lain.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini diantaranya tingkat kemiskinan provinsi Yogyakarta mengalami peningkatan sehingga data dari BPS menyatakan bahwa provinsi Yogyakarta sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Selain itu, penyaluran dana zakat, PDRB dan tingkat pendidikan cenderung mengalami peningkatan sehingga memiliki potensi yang cukup besar untuk menurunkan kemiskinan di Provinsi Yogyakarta, namun faktanya angka kemiskinan masih tinggi bahkan tertinggi di Pulau Jawa. Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“Pengaruh Penyaluran Zakat, PDRB dan Pendidikan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Yogyakarta Tahun 2016-2022”**.

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun periode dan variabel independen yang diteliti. Dimana periode

pengamatan dalam penelitian ini relatif lebih panjang dan terbaru yaitu tahun 2016-2022. Selain itu, variabel independen yang digunakan adalah penyaluran dana zakat, PDRB dan pendidikan. Dimana penelitian ini menggabungkan penelitian terdahulu dengan menjadikan penyaluran dana zakat, PDRB dan pendidikan sebagai variabel independen supaya hasil yang didapatkan lebih komprehensif.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh penyaluran zakat, PDRB dan pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Yogyakarta Tahun 2016-2022. Penelitian ini penting untuk dilakukan, karena dapat memberikan input kepada pemerintah Provinsi Yogyakarta dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan zakat, PDRB dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal pengentasan masalah kemiskinan di Provinsi Yogyakarta.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Yogyakarta, yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota. Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari seluruh objek penelitian secara tidak langsung. Data sekunder dapat diperoleh melalui situs internet, maupun melalui sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh peneliti (Wibowo, 2023). Data sekunder yang digunakan pada penelitian adalah jumlah penyaluran dana zakat, PDRB dan presentase tingkat pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Yogyakarta dari tahun 2016-2022. Data tersebut diperoleh dari website resmi BAZNAS Kabupaten/Kota di Yogyakarta dan Badan Pusat Statistik.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Yogyakarta yang berjumlah 4 Kabupaten dan 1 Kota. Sedangkan sampel yang digunakan terdiri dari seluruh populasi yaitu 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul dan 1 Kota Yogyakarta. Sehingga jumlah data yang diuji selama 7 (tujuh) tahun sebanyak 35 data.

Definisi Operasional Variabel

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Satuan	Sumber
Kemiskinan	Presentase jumlah penduduk miskin berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Yogyakarta tahun 2016-2022.	Persen (%)	Badan Pusat Statistik (BPS)
Zakat	Jumlah dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS kepada mustahik di Provinsi Yogyakarta tahun 2016-2022.	Milyar(Rp)	BAZNAS Kabupaten/ Kota di Yogyakarta
PDRB	Jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi menurut lapangan usaha menggunakan harga konstan di Provinsi Yogyakarta tahun 2016-2022.	Triliun(Rp)	Badan Pusat Statistik (BPS)
Pendidikan	Jumlah tahun dalam mengenyam pendidikan (rata-rata lama sekolah) di Provinsi Yogyakarta tahun 2016-2022.	Tahun	Badan Pusat Statistik (BPS)

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan studi kepustakaan dan *internet research* atau data yang diperoleh dari hasil pencarian melalui website/web resmi dan tahun penggunaan 2016-2022.

Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Dalam penelitian ini data panel yang digunakan adalah dengan menggabungkan data time series dari tahun 2016 hingga 2022 dan data cross section di 4 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi DI Yogyakarta.

Dalam regresi data panel memiliki tiga metode dalam mengestimasi model yaitu *common effect model (CEM)*, *fixed effect model (FEM)* dan *random effect model (REM)*. Untuk menentukan metode atau model yang akan digunakan dalam analisis regresi data panel, maka diperlukan pengujian pemilihan model terbaik antara uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier. Setelah melakukan pengujian pemilihan model terbaik. Selanjutnya dapat melakukan uji asumsi klasik, yaitu dengan melakukan uji normalitas, uji multikolineartas dan uji heteroskedastisitas. Kemudian, dapat melakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi (R²), uji simultan (uji F), dan uji parsial (uji t) (Giovanni, 2018).

Adapun persamaan regresi data panel dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1,it} + \beta_2 X_{2,it} + \beta_3 X_{3,it} + \epsilon_{it}$$

Dengan keterangan:

- Y = Kemiskinan
X1 = Penyaluran Zakat

- X2 = PDRB
X3 = Pendidikan
 β_0 = Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi
i = Cross section
t = Time Series
 ϵ = Error Term

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memprediksi hasil regresi agar model yang digunakan bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimation). Pada penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan diantaranya uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Berikut merupakan hasil pengujian dari asumsi klasik:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam regresi data panel dapat ditentukan dengan melihat nilai probabilitas dari residual hasil regresi. Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih dari 0,05, hasil tersebut berdistribusi normal, dan sebaliknya, apabila nilai probabilitas yang diperoleh kurang dari 0,05, maka hasil tersebut tidak berdistribusi normal.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Shapiro-Wilk Normality Test			
W	0.96116	Prob>z	0,24770

Sumber: Data diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 2, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,24770 > 0,05. Maka dapat diartikan hasil tersebut terdistribusi normal. Dengan demikian,

model regresi data panel telah memenuhi asumsi normalitas atau tidak terdapat masalah normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara melihat nilai tolerance dan VIF, apabila nilai VIF lebih dari 10, maka hasil tersebut menunjukkan adanya multikolinearitas, dan sebaliknya, apabila nilai VIF kurang dari 10, maka hasil tersebut tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
X1	1.33
X2	2.78
X3	3.29
Mean VIF	2.46

Sumber: Data diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 3, dapat diketahui bahwa nilai VIF adalah 2,46, yang artinya nilai VIF kurang dari 10, maka dalam model ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya, apabila nilai probabilitas lebih dari tingkat signifikan sebesar 0,05, maka hasil tersebut tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity	
chi2(1)	1.15
Prob > chi2	0.2843

Sumber: Data diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas dari hasil uji diatas adalah 0,2843. Artinya, nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Analisis Regresi Data Panel

Pemilihan Model

Pemilihan model regresi data panel dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Untuk menentukan model regresi terbaik dapat dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya uji Chow, uji Hausman

dan Uji Lagrang Multiplier. Berikut adalah hasil dari pemilihan model:

Tabel 5. Pemilihan Model

Penguji	P-value	H ₀	H ₁	Hasil uji	Pemilihan model
Uji Chow	0.302	CE	FEM	Menerima a H ₀	CEM
	0	M		Menolak H ₁	
Uji Hausman	0.381	RE	FEM	Menerima a H ₀	REM
	1	M		Menolak H ₁	
Uji LM	0.176	CE	RE	Menerima a H ₀	CEM
	0	M	M	Menolak H ₁	

Sumber: Data diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan hasil uji pemilihan model pada tabel 5, dapat diketahui bahwa pemilihan model terbaik adalah *Common Effect Model (CEM)*.

Estimasi Model

Dari hasil pemilihan model regresi data panel, maka dapat diperoleh hasil estimasi regresi *Common Effect Model* dengan persamaan model sebagai berikut:

$$Y = 5.201862 + 0.0338067X_1 - 0.0242993X_2 - 0.4431837X_3$$

Tabel 6. Hasil Regresi Common Effect Model

Variabel	Coefficients	Std. Error	t-value	Prob
C	5.201862	1.690032	3.08	0.005
X1	0.0338067	0.0163851	2.06	0.049
X2	-0.0242993	0.0203497	-1.19	0.243
X3	-0.4431837	0.202062	-2.19	0.037

Sumber: Data diolah Peneliti (2024)

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini, dapat dilakukan dengan uji simultan (uji F), uji parsial (uji T) dan koefisien determinasi. Pengujian hipotesis dapat dilakukan berdasarkan hasil estimasi *Common Effect Model (CEM)*.

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (Penyaluran Dana Zakat, PDRB dan Tingkat Pendidikan) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Tingkat Kemiskinan) dengan membandingkan antara F-

hitung dengan F-tabel. Berikut merupakan hasil uji signifikansi simultan (uji F):

Tabel 7. Uji Simultan (Uji F)

F(3,31)	103.89
Prob > F	0.0000

Sumber: Data diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 7, diperoleh nilai F-hitung 103,89 sementara F-tabel dengan tingkat $\alpha = 5\%$ pada $df1 = 3$ dan $df2 = 30$ sebesar 2,922. Dengan demikian, F-hitung > F-tabel ($103,89 > 2,922$) serta nilai probabilitas $0.0000 < 0,05$ sehingga H1 diterima. Dengan demikian, variabel Penyaluran Dana Zakat, PDRB dan Tingkat Pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan.

b. Uji Parsial (Uji Statistik T)

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh masing-masing variabel independen (Penyaluran Dana Zakat, PDRB dan Tingkat Pendidikan) secara individual terhadap variabel dependen (Tingkat Kemiskinan) yang diuji dengan membandingkan antara T-hitung dan T-tabel. Suatu variabel akan memiliki pengaruh signifikan apabila nilai T-hitung variabel tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai T-tabel. Berikut merupakan hasil uji T:

Tabel 8. Uji Parsial (Uji T)

Variabel	Coefficients	Prob.
Cons	2.745317	0.000*
X1	+ 0.0179895	0.091*
X2	- 0.0187114	0.000*
X3	- 0.189825	0.000*

Sumber: Data diolah Peneliti (2024)

*Keterangan : * $\alpha / aplha = (0,05 / 5\%)$*

Berikut merupakan penjelasan terkait hasil temuan pada tabel 7:

1) Pengaruh Penyaluran Dana Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan

Hasil uji T pada tabel 8, menunjukkan bahwa variabel penyaluran dana zakat memiliki nilai probabilitas sebesar $0,091 > \text{dari } \alpha (0,05)$ dan nilai T-hitung lebih besar dari T-table ($1,8 > 1,696$). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga penyaluran dana zakat tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Dalam tabel 8, variabel penyaluran dana zakat menunjukkan tanda positif dengan nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0,0179895.

Hal ini berarti bahwa apabila penyaluran dana zakat naik sebesar 1 milyar, maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 1,8 persen.

2) Pengaruh PDRB terhadap Pengentasan Kemiskinan

Hasil uji T pada tabel 8, menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki nilai probabilitas sebesar $0,000 < \text{dari } \alpha (0,05)$ dan nilai T-hitung lebih besar dari T-table ($1,88 > 1,696$). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa H1 diterima, sehingga PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Dalam tabel 8, variabel PDRB menunjukkan tanda negatif dengan nilai koefisien yang diperoleh sebesar - 0,0187114. Hal ini berarti bahwa apabila PDRB naik sebesar 1 triliun, maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 1,88 persen.

3) Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Pengentasan Kemiskinan

Hasil uji T pada tabel 8, menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan memiliki nilai probabilitas sebesar $0,000 < \text{dari } \alpha (0,05)$ dan nilai T-hitung lebih besar dari T-table ($1,9 > 1,696$). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa H1 diterima, sehingga tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Dalam tabel 8, variabel tingkat pendidikan menunjukkan tanda negatif dengan nilai koefisien yang diperoleh sebesar -0,189825. Hal ini berarti bahwa apabila tingkat pendidikan naik sebesar 1 tahun, maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 1,9 persen.

c. Uji *Adjusted R Square* (Koefisien Determinasi)

Uji *Adjusted R Square* (Koefisien Determinasi) digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut merupakan hasil uji Koefisien Determinasi:

Tabel 9. Koefisien Determinasi

R-Squared	0.9095
Adj R-Squared	0.9008

Sumber: Data diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan hasil pada tabel 9, nilai Adjusted R-Square ($R^2 \text{ adj}$) sebesar 0.9008. dengan demikian, variabel dependen (Tingkat Kemiskinan) secara simultan dapat dijelaskan oleh variabel independen (Penyaluran Dana

Zakat, PDRB dan Pendidikan) sebesar 90,08% sedangkan sisanya yaitu 9,92% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

3.2. Pembahasan

Pengaruh Penyaluran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel penyaluran dana zakat tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karimah et al., (2018); Islami & Fitrianto, (2023); Tamimi & Syarbaini, (2023); Putri et al., (2023) yang menyatakan bahwa penyaluran dana zakat tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan.

Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani, (2019); Sukri, (2019); Muliadi & Amri, (2019) Hardana, (2022); Hidayat et al., (2023); Imsar et al., (2023) yang menyatakan bahwa penyaluran dana zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini terjadi karena, penyaluran dana zakat yang bertahap dan tepat sesuai sasaran dapat meningkatkan kualitas sumber daya mustahik sehingga mustahik mudah dalam memperoleh akses pekerjaan dan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, dana zakat yang dialokasikan untuk kebutuhan sosial dan pendidikan dapat membantu memutus siklus kemiskinan yang ada di Indonesia.

Dalam penelitian ini, data penyaluran dana zakat yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta pada tahun 2016-2022 mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Terdapat 5 (lima) program yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahik, yaitu program DIY Peduli, DIY Sehat, DIY Sejahtera, DIY Cerdas dan DIY Taqwa. Dari kelima program tersebut, 2 (dua) diantaranya bersifat konsumtif yaitu program DIY Peduli dan DIY Sehat, dan 3 (tiga) diantaranya bersifat produktif yaitu DIY Sejahtera, DIY Cerdas dan DIY Taqwa. Namun, hasil penelitian menyatakan bahwa zakat tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Yogyakarta. Hal ini terjadi karena, penyaluran dana zakat kepada mustahik lebih besar diberikan dalam bentuk zakat konsumtif. Berdasarkan data laporan akhir tahunan BASNAZ Provinsi Yogyakarta dari tahun 2016-2022

selalu memprioritaskan pengalokasian dana zakat untuk fakir miskin dengan proporsi sekitar 60% sampai 80% (BAZNAS (2017); BAZNAS (2018); BAZNAS (2019); BAZNAS (2020); BAZNAS (2022)).

Selain itu, berdasarkan data laporan akhir BAZNAS Provinsi Yogyakarta pada tahun 2022, pengalokasian dana zakat disalurkan melalui program DIY Peduli dengan presentase sekitar 68% dan program DIY Sehat sekitar 5,24% yang bersifat sementara waktu dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum dari mustahik. Kemudian, pengalokasian dana zakat juga disalurkan melalui DIY Sejahtera sekitar 1,96%, DIY Takwa sekitar 4,1% dan DIY Cerdas sekitar 19,71% (BAZNAS, 2023). Berdasarkan data tersebut, zakat produktif memberikan pengaruh yang lebih kecil daripada zakat konsumtif. Hal ini berbanding terbalik dengan konsep zakat yang menyatakan bahwa pengaruh zakat produktif akan memberikan manfaat yang lebih banyak daripada zakat konsumtif. Karena zakat konsumtif sifatnya tidak dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga bisa habis begitu saja (Nurlita & Ekawaty, 2018).

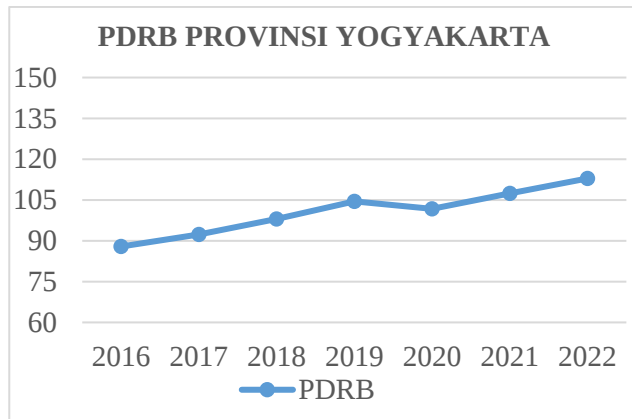
Adapun pengaruh rendahnya zakat produktif daripada zakat konsumtif disebabkan oleh banyaknya ketimpangan atau permasalahan sosial di Provinsi Yogyakarta yang membutuhkan perhatian khusus dari BASNAZ Provinsi Yogyakarta, sehingga penyaluran terbesar disalurkan untuk program kemanusiaan (Widyastuti, 2023). Seharusnya, penyaluran dana zakat didistribusikan secara seimbang dalam bentuk zakat produktif, seperti pemberian bantuan biaya hidup berupa modal usaha dan bantuan program pendidikan lainnya untuk mengembangkan produktivitas pada mustahik. Dengan demikian, zakat produktif akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar untuk menambah faktor produksi dalam kegiatan usaha mustahik sehingga dapat meningkatkan *output* dan pendapatan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga bagi mustahik. Selain itu, zakat produktif bisa memperbaiki kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Irwanda, (2021).

Pengaruh PDRB Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Giovanni, (2018); Purnomo, (2019); Nabilawaty & Hutajulu, (2021); Tjiabrata et al., (2021); Widya Ningsih et al., (2022); Hasibuan et al., (2022) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Dalam penelitian ini, nilai PDRB di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta pada tahun 2016-2022 mengalami kenaikan yang cukup stabil sehingga mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Yogyakarta. Berikut grafik pergeseran nilai PDRB di Provinsi Yogyakarta dari tahun 2016-2022:



Gambar 4. Grafik Pergeseran Nilai PDRB Provinsi Yogyakarta

Sumber: Data diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan gambar 4, nilai PDRB dari tahun 2016-2022 mengalami kenaikan yang cukup stabil. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan aktivitas dalam perekonomian yang memicu perluasan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja yang tinggi. Dengan demikian, pendapatan masyarakat akan meningkat dan memungkinkan masyarakat untuk mengonsumsi jumlah barang maupun jasa yang lebih banyak serta beragam. Secara filosofis, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat karena banyaknya konsumsi atau pengeluaran dari masing-masing rumah tangga. Apabila pengeluaran masyarakat meningkat maka akan membutuhkan produksi barang/jasa yang lebih banyak untuk memenuhi (men-supply) permintaan mereka. Peningkatan produksi barang/jasa tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Berdasarkan fakta dilapangan, konsumsi masyarakat di Provinsi Yogyakarta cenderung tinggi, sehingga pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dengan hasil kinerja perekonomian Provinsi Yogyakarta pada tahun 2022

yang tumbuh sebesar 5,15%, yang diukur dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010. Pertumbuhan ini disebabkan karena semua lapangan usaha mengalami peningkatan, bahkan tiga di antaranya mengalami pertumbuhan hingga dua digit yaitu, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 18,26%, disusul jasa lainnya sebesar 15,04% dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,40% (BPS, 2023).

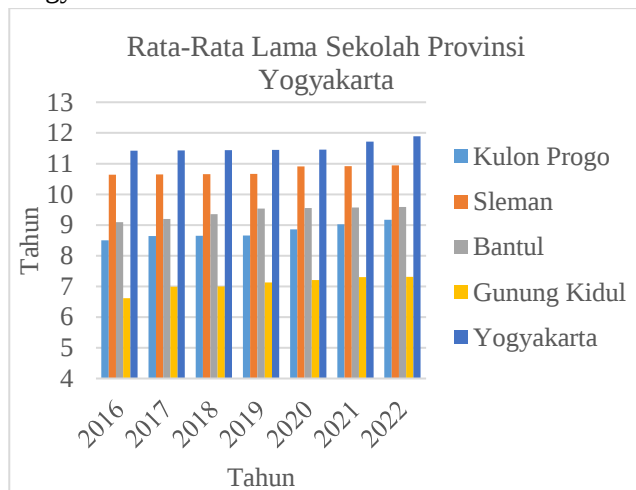
Selain itu, struktur perekonomian di Provinsi Yogyakarta didominasi oleh 5 (lima) kategori PDRB yang kontribusinya terbesar yaitu sektor industri pengolahan sebesar 11,93%, sektor informasi dan komunikasi sebesar 10,3%, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 9,89%, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 9,97% dan sektor konstruksi sebesar 9,92%. Peran dari kelima lapangan usaha tersebut mencapai 52,01% terhadap perekonomian Provinsi Yogyakarta (BPS, 2023). Adanya peningkatan nilai PDRB disetiap tahunnya dan menyebar di semua golongan dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Yogyakarta. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Prof. Simon Kuznets (1949) yang menyatakan bahwa persoalan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi yang sangat kuat. Karena dengan pertumbuhan ekonomi mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara berkesinambungan (Tjiabrata et al., 2021; BPS, 2022; BPS, 2023))

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bintang & Woyanti, (2018); Islami & Anis, (2019) Purnomo, (2019); Widya Ningsih et al., (2022); Adhitya et al., (2022) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, yang berarti, semakin tinggi tingkat pendidikan di suatu daerah maka semakin rendah tingkat kemiskinan di daerah tersebut, begitupun sebaliknya.

Salah satu cara pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di bidang pendidikan adalah menetapkan rata-rata lama sekolah yaitu dengan menerapkan program wajib belajar selama 12 tahun. Program ini diatur dalam pasal 31 UUD RI Tahun

1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (DPRRI, 2023). Selain program wajib belajar, pemerintah juga memberikan bantuan beasiswa kepada masyarakat miskin atau program bantuan siswa miskin (BSM). Adapun tujuan ditetapkan program ini adalah untuk meratakan pendidikan dan mengurangi kesenjangan capaian pendidikan antar kelompok masyarakat. Dalam penelitian ini, rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta pada tahun 2016-2022 mengalami kenaikan yang stabil. Berikut gambar terkait peningkatan pendidikan di Provinsi Yogyakarta:



Gambar 5. Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Yogyakarta

Sumber: Data diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan gambar 5, rata-rata lama sekolah di 4 Kabupaten dan 1 Kota Provinsi Yogyakarta meningkat di setiap tahunnya, sehingga dapat membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Yogyakarta (BPS, 2022). Dengan demikian, tingkatan pendidikan merupakan faktor penting dalam membantu seseorang untuk keluar dari masalah kemiskinan. Secara teoritis, semakin tinggi pengetahuan atau pendidikan seseorang maka dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk berpikir dan memecahkan suatu masalah (Aini & Islamy, (2021); Tjiabrata et al., (2021)).

Selain itu, seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mampu mengasah kemampuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendapat pekerjaan yang layak. Hal ini tentu akan menguntungkan bagi seseorang dengan mengharapkan pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan sebelumnya. Di saat pendapatan seseorang tinggi, tentunya akan dapat memenuhi

kebutuhan dasar sehingga terhindar dari kemiskinan. Hal ini sesuai dengan *Teory Human Capital* yang ditemukan oleh Becker, (1993), yang mengajarkan bahwa pendidikan dapat membantu meningkatkan produktivitas seseorang dengan keahlian atau skill yang dimilikinya. Dengan demikian, peningkatan produktivitas akan membantu seseorang dalam menyejahterakan keluarganya dan kemiskinan akan berkurang (Ariasih & Yuliarmi, 2021).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh penyaluran dana zakat, PDRB dan pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Yogyakarta Tahun 2016-2022. Adapaun pokok-pokok pembahasan yang disimpulkan peneliti dari hasil pembahasannya sebagai berikut: pertama, penyaluran dana zakat tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini terjadi karena penyaluran dana zakat kepada mustahik diberikan dalam bentuk zakat konsumtif. Seharusnya, penyaluran dana zakat didistribusikan secara seimbang dalam bentuk zakat produktif. Kedua, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Karena nilai PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta pada tahun 2016-2022 mengalami kenaikan yang cukup stabil sehingga mampu untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Yogyakarta. Ketiga, pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini terjadi karena, dengan tinggi nya pendidikan akan mempengaruhi seseorang dalam memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendapat pekerjaan yang layak.

5. REFERENSI

- Adhitya, B., Prabawa, A., & Kencana, H. (2022). Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.501>
- Aini, L. N., & Islamy, S. N. (2021). Dampak Pengurangan, Pendidikan, Kesehatan, PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(3), 132–141. <https://doi.org/10.53088/jerps.v1i3.325>

- Ariasih, N. L. M., & Yuliarmi, N. N. (2021). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali*. 1(7), 807–825.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. *Badan Pusat Statistik*, 57, 1–8. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>
- BAZNAS, P. (2017). *Laporan Keuangan BAZNAS DIY 2017.pdf*. [https://bucket-api.baznas.go.id/bucket-api/file?bucket=bzn-fdr-smb-p5739641&file=attachments/laporan/329-Laporan Audit 2017 - Pemutakhiran- BAZNAS DIY_compressed.pdf](https://bucket-api.baznas.go.id/bucket-api/file?bucket=bzn-fdr-smb-p5739641&file=attachments/laporan/329-Laporan%20Audit%202017%20-%20Pemutakhiran-%20BAZNAS%20DIY_compressed.pdf)
- BAZNAS, P. (2018). *Laporan Keuangan BAZNAS DIY 2018.pdf*. [https://bucket-api.baznas.go.id/bucket-api/file?bucket=bzn-fdr-smb-p5739641&file=attachments/laporan/556-Laporan Audit 2018- BAZNAS DIY_compressed.pdf](https://bucket-api.baznas.go.id/bucket-api/file?bucket=bzn-fdr-smb-p5739641&file=attachments/laporan/556-Laporan%20Audit%202018-%20BAZNAS%20DIY_compressed.pdf)
- BAZNAS, P. (2019). *Laporan Keuangan BAZNAS DIY 2019.pdf*. [https://bucket-api.baznas.go.id/bucket-api/file?bucket=bzn-fdr-smb-p5739641&file=attachments/laporan/603-Laporan Keuangan Audited Tahun 2019_compressed.pdf](https://bucket-api.baznas.go.id/bucket-api/file?bucket=bzn-fdr-smb-p5739641&file=attachments/laporan/603-Laporan%20Keuangan%20Audited%20Tahun%202019_compressed.pdf)
- BAZNAS, P. (2020). *Laporan Keuangan BAZNAS DIY 2020.pdf*. [https://bucket-api.baznas.go.id/bucket-api/file?bucket=bzn-fdr-smb-p5739641&file=attachments/laporan/712-Laporan Audited BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020_compressed.pdf](https://bucket-api.baznas.go.id/bucket-api/file?bucket=bzn-fdr-smb-p5739641&file=attachments/laporan/712-Laporan%20Audited%20BAZNAS%20Daerah%20Istimewa%20Yogyakarta%20Tahun%202020_compressed.pdf)
- BAZNAS, P. (2022). *Laporan Keuangan BAZNAS DIY 2022*.
- BAZNAS, P. (2023). *Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi DI Yogyakarta*. <https://diy.baznas.go.id/Keuangan>. <https://diy.baznas.go.id/keuangan>
- Bintang, A. B. M., & Woyanti, N. (2018). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011-2015). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(1), 20–28. <https://doi.org/10.24856/mem.v33i1.563>
- BPS. (2023). Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan IV 2022. *Www.Yogyakarta.Bps.Go.Id*, 36, Press Release. <https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1231/pertumbuhan-ekonomi-diy-triwulan-iv-2021.html>
- BPS, Y. (2022a). Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021. *BPS Provinsi DI Yogyakarta*, 5(1), 1–162. <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa>
- BPS, Y. (2022b). *[Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)*. <https://Yogyakarta.Bps.Go.Id/>. <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/26/318/1-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>
- Choiriyah. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGANAN KEMISKINAN; STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI KELURAHAN KUTO BATU*. 3, 17–30.
- DPRRI. (2023). *Komisi X DPR RI Dorong Kemendikbudristek Tuntaskan Wajib Belajar 12 Tahun*. [Www.Dpr.Go.Id](http://www.dpr.go.id). <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42893/t/Komisi+X+DPR+RI+Dorong+Kemendikbudristek+Tuntaskan+Wajib+Belajar+12+Tahun>
- Giovanni, R. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 23–31. <https://doi.org/10.15294/edaj.v7i1.21922>
- Hardana, A. (2022). Keikutsertaan Dana Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 65–74. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1895>
- Hasibuan, R. R. A., Kartika, A., Suwito, F. A., & Agustin, L. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(3), 683–693. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i3.887>
- Hidayat, M. S., Rohmah, R. R., Asiyah, B. N., & ... (2023). Implementasi Sistem Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 1–10. [http://repo.uinsatu.ac.id/33666/1/B_Implementasi Sistem Ekonomi Islam untuk pengentasan kemiskinan.pdf](http://repo.uinsatu.ac.id/33666/1/B_Implementasi%20Sistem%20Ekonomi%20Islam%20untuk%20pengentasan%20kemiskinan.pdf)
- Imsar, I., Sitompul, F. A., & Nasution, J. (2023). Pengaruh Dana Zakat, Pembiayaan Syariah, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening. *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v4i1.557>
- Irwanda, M. (2021). Pengaruh Zakat Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 5(2), 91–98. <https://doi.org/10.24127/pro.v8i2.3436>

- Islami, & Fitrianto, A. R. (2023). Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, Inflasi, Dan Gini Ratio Terhadap Tingkat Kedalaman Kemiskinan Satu Dekade. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 229–239.
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6994>
- Islami, N., & Anis, A. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 939.
<https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7721>
- Jayadi, D. S., & Brata, A. G. (2016). Peran Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menurunkan Kemiskinan di Tingkat Provinsi di Indonesia Tahun 2004-2012. *Modus*, 28(1), 91.
<https://doi.org/10.24002/modus.v28i1.669>
- Karimah, Khusnul, H., & Aisyah, S. (2018). Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dan Indikator Ekonomi Makro Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2018-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1243–1250.
- Maharani, F. A. (2019). Analisis Pengaruh Pendistribusian Dana Zis Baznas Jatim Dan Income Per Capita Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur Periode 2012-2016. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1), 1–10.
- Muliadi, M., & Amri, K. (2019). Penerimaan Zakat dan Penurunan Kemiskinan di Aceh: Peran Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 231.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.706>
- Muliza, M. (2020). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Nagan Raya. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 12(1), 63.
<https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i01.361>
- Nabilawaty, R. C., & Hutajulu, D. M. (2021). Analisis Determinan Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 - 2020. *JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi)*, 6(02), 117–127.
<https://doi.org/10.36665/jusie.v6i02.430>
- Nurlita, E., & Ekawaty, M. (2018). Pengaruh ZZakat Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Mustahik (Studi Pada Penerima Zakat Dari BASNAZ Kota Probolinggo). *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3, 85–105.
- Purnomo, S. D. (2019). Determinan Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah (Al-Amwal)*, 11(1), 47–58.
<https://doi.org/10.31539/costing.v5i2.2417>
- Putri, N., Irfan, M., & Artikel, I. (2023). Pengaruh Bantuan Sosial dan Zakat terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat. 12(November), 110–117.
- Sukri, F. B. (2019). Analisis Program Zakat Produktif sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah Kota Yogyakarta. *Az Zaqqa*, 11(1), 157–176.
- Tamimi, K., & Syarbaini, A. M. B. (2023). Analisis Interaksi Dan Kontribusi Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dan Islamic Human Development Index (I-HDI) Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Inovasi: Jurnal EKonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 19(3), 678–688.
- Tjiabrata, A., Engka, D. S. M., & Rompas, W. F. I. (2021). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(7), 90–101.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/38122/34846>
- Wibowo, A. A. (2023). Pengaruh Distribusi Dana Zakat Infak Sedekah (Zis), Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy) Periode 2016-2022. In *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (Issue 15018).
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74404%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/74404/1/SKRIPSI_AHKMAD_ACHSANI_WIBOWO.pdf
- Widya Ningsih, A., Fitriyana, R., & Hernisyafitri, N. (2022). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Seminar Nasional Hasil Riset*, 23–30.
- Widyastuti, R. A. Y. (2023). *Menelisik Yogyakarta, Provinsi dengan Tingkat Ketimpangan Tertinggi di Indonesia*. <https://bisnis.tempo.co/>.
<https://bisnis.tempo.co/read/1683858/menelisik-yogyakarta-provinsi-dengan-tingkat-ketimpangan-tertinggi-di-indonesia>